



## Peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Literatur

Valentina Rentauli Siringoringo<sup>1</sup>, Ulul Azmi Fadhilah<sup>2</sup>, Muhammad Rizal<sup>3</sup>, Bunga Ervinasari<sup>4</sup>

[valentinaasirs10@email.com](mailto:valentinaasirs10@email.com)<sup>1</sup>, [azmiu7634@gmail.com](mailto:azmiu7634@gmail.com)<sup>2</sup>, [muhhammadrizall@unimed.ac.id](mailto:muhhammadrizall@unimed.ac.id)<sup>3</sup>, [sribungawinarmi@gmail.com](mailto:sribungawinarmi@gmail.com)<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Medan

<sup>4</sup> Universitas Negeri Padang

### Article Info

#### Article history:

Received Oktober 12<sup>th</sup>, 2023

Revised Oktober 20<sup>th</sup>, 2023

Accepted November 26<sup>th</sup>, 2023

### Kata Kunci:

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Laporan Keuangan Pemerintah

Akuntabilitas

Transparansi Keuangan

### ABSTRAK

Sistem pengendalian internal memainkan peran krusial dalam memastikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya menjadi alat akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui kajian literatur. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data yang dilakukan melalui studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif, yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, mampu meningkatkan akurasi, keandalan, dan ketepatan waktu laporan keuangan secara signifikan. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian internal guna mencapai laporan keuangan yang berkualitas dan memenuhi standar akuntansi pemerintah.

### ABSTRACT

The internal control system plays a crucial role in ensuring the quality of local government financial statements. Quality financial reports are not only a tool of accountability and transparency, but also support effective decision making. This study aims to analyze the role of the internal control system in improving the quality of local government financial reports through a literature review. The method used is a qualitative approach with data collection techniques carried out through literature studies. The results show that an effective internal control system, which includes the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring, can significantly improve the accuracy, reliability, and timeliness of financial statements. These findings provide practical implications for local governments in strengthening the internal control system in order to achieve quality financial statements that meet government accounting standards.



© 2023 Para Penulis. Diterbitkan oleh Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan Indonesia (PKMPI). Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Valentina Rentauli Siringoringo,

## Latar Belakang

Sistem keuangan yang mengalami kemajuan dan pembaharuan dari waktu ke waktu meningkatkan tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah. Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan pembangunan serta pelayanan publik yang optimal. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan alat utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Dalam Nasirwan et. al (2024) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah yang baik adalah laporan keuangan yang memiliki unsur transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu membantu pemerintah dalam mengambil langkah dan keputusan dalam menetapkan kebijakan di masa yang akan datang. Pemerintah daerah diharuskan untuk mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance* agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien (Mardiasmo, 2020). Dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan menjadi salah satu instrumen utama untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah, sekaligus sebagai alat pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Mahmudi, 2019). Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristik fundamental yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Laporan keuangan yang berkualitas tinggi akan membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, baik terkait kebijakan anggaran, investasi, maupun perencanaan pembangunan daerah (Halim & Kusufi, 2021). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat banyak permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, seperti ketidaksesuaian dengan standar akuntansi, kesalahan pencatatan, rendahnya kepatuhan terhadap regulasi, serta temuan signifikan dalam laporan audit yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal (BPK, 2023). Penelitian oleh Septyanto dan Pratolo (2020) mengungkapkan bahwa ketidakakuratan data, keterlambatan penyampaian laporan, dan kurangnya transparansi masih menjadi masalah umum di berbagai daerah. Hal ini tidak hanya mengurangi kepercayaan publik, tetapi juga menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaannya masih menemukan berbagai kelemahan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yang berujung pada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan Tidak Wajar (TW). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2023, beberapa permasalahan utama yang menyebabkan kualitas laporan keuangan belum optimal adalah lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta adanya indikasi fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nugroho (2021) mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sistem pengendalian internal (SPI) merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) dalam Framework (2019), SPI yang efektif terdiri dari lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penerapan SPI yang baik dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, mencegah kesalahan, dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi standar akuntansi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, terdapat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi instrumen utama dalam menjamin efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. SPIP merupakan serangkaian proses yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi untuk memberikan keyakinan memadai terhadap

pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008). Implementasi SPIP yang baik diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi risiko kesalahan pencatatan, meningkatkan transparansi, serta mencegah praktik kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara (Setiawan & Rohman, 2022).

Menurut konsep pengendalian internal yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), sistem pengendalian internal terdiri dari lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam konteks pemerintahan, kelima komponen ini harus diimplementasikan secara optimal agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya (COSO, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Ramadhani (2021) menunjukkan bahwa penerapan SPIP yang efektif memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi keuangan.

Di Indonesia, penerapan SPIP masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah mengenai pentingnya pengendalian internal, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah, serta resistensi terhadap perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan (Haryanto, 2020). Misalnya, penelitian oleh Bastian (2015) mengungkapkan bahwa ketidakakuratan data, keterlambatan penyampaian laporan, dan kurangnya transparansi masih menjadi masalah umum di berbagai daerah. Hal ini tidak hanya mengurangi kepercayaan publik, tetapi juga menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif. Selain itu, dalam beberapa kasus, lemahnya komitmen pimpinan daerah dalam mendukung penerapan SPIP yang lebih baik juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam mengoptimalkan implementasi SPIP agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan SPIP dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nugroho (2021) menemukan bahwa daerah yang telah mengimplementasikan SPIP secara optimal cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih akurat dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Temuan serupa juga diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Lestari (2022), yang menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan secara signifikan. Penelitian lainnya oleh Septyanto dan Pratolo (2020) menunjukkan bahwa SPIP yang efektif secara signifikan meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini didukung oleh penelitian Sari dan Putra (2021) yang menyatakan bahwa implementasi SPIP yang baik dapat mengurangi risiko kesalahan material dalam laporan keuangan. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa implementasi SPIP masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan keterbatasan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan temuan Wijaya dan Nugroho (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan SPIP sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komitmen manajemen, budaya organisasi, dan dukungan teknologi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan memahami bagaimana efektivitas pengendalian internal dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem pengendalian internalnya, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, akuntabel, dan transparan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada pemerintah daerah.

---

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2021) dalam bukunya *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam dengan menganalisis sumber-sumber yang relevan. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif, seperti dokumen, teks, atau catatan. Salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah studi literatur, yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, dan laporan resmi guna memperoleh pemahaman teoretis dan empiris mengenai suatu topik tertentu. Studi literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis temuan dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal, buku, dan dokumen resmi pemerintah. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder, yang meliputi jurnal ilmiah, buku teks, dokumen resmi pemerintah, dan studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi sumber-sumber terpercaya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penulis, dan tahun publikasi yang terbaru.

Dalam penelitian ini, studi literatur digunakan untuk mengkaji peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Sugiyono (2021), studi literatur berfungsi untuk menemukan teori yang relevan dengan penelitian, mengidentifikasi kesenjangan penelitian sebelumnya, serta memperkuat dasar teoretis yang digunakan dalam analisis data. Sumber utama dalam penelitian ini berasal dari regulasi pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta berbagai jurnal ilmiah dan buku yang membahas tentang pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan di sektor publik. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur mengenai pengendalian internal dalam sektor publik serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui penguatan sistem pengendalian internal.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) memiliki peran signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa SPIP yang efektif, yang mencakup lima komponen utama yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan akurasi, keandalan, dan ketepatan waktu laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Septyanto dan Pratolo (2020) yang menyatakan bahwa SPIP yang baik dapat mengurangi kesalahan material dan meningkatkan transparansi laporan keuangan.

Berdasarkan studi terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), daerah yang memiliki pengendalian internal yang baik cenderung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan daerah dengan kelemahan dalam penerapan SPIP sering kali mendapatkan opini yang lebih rendah, seperti Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan Tidak Wajar (TW). Selain itu, studi terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berbanding lurus dengan kualitas laporan keuangan (Rahman & Lestari, 2022).

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai hubungan antara SPIP dan kualitas laporan keuangan, beberapa kasus pemerintah daerah di Indonesia dapat dijadikan referensi. Beberapa daerah yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam beberapa tahun terakhir, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, diketahui memiliki pengendalian internal yang lebih baik dibandingkan daerah yang mendapatkan opini lebih rendah, seperti Sulawesi Barat atau Papua.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pencapaian WTP di daerah dengan SPIP yang baik antara lain:

1. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010.
2. Sistem akuntansi berbasis akrual yang lebih transparan dibandingkan sistem berbasis kas.
3. Komitmen pimpinan daerah dalam memperkuat pengawasan keuangan melalui inspektorat dan auditor internal.

Sebaliknya, daerah yang memiliki opini WDP atau TW sering kali mengalami permasalahan dalam aspek berikut:

1. Kelemahan dalam lingkungan pengendalian, misalnya banyaknya pejabat yang belum memahami konsep pengendalian internal.
2. Kurangnya penilaian risiko dalam pengelolaan anggaran, yang menyebabkan tingginya kasus penyalahgunaan dana.
3. Sistem pencatatan keuangan yang belum terintegrasi, sehingga laporan keuangan sulit untuk diverifikasi secara akurat.

### **Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

SPIP memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut teori pengendalian internal COSO (2019) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, terdapat 5 (lima) komponen utama SPIP yang harus diterapkan agar pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian, menciptakan budaya pengendalian yang baik di dalam organisasi, termasuk integritas, nilai etika, dan kompetensi pegawai dalam mengelola keuangan daerah.
2. Penilaian Risiko, mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mempengaruhi keakuratan dan keandalan laporan keuangan.
3. Aktivitas Pengendalian, menerapkan kebijakan dan prosedur yang dapat mengurangi risiko kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan.
4. Informasi dan Komunikasi, memastikan bahwa informasi keuangan dapat diakses dengan mudah dan dilaporkan secara akurat.
5. Pemantauan, melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pengendalian internal.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan kelima komponen ini dengan baik cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih berkualitas (Jonas & Blanchet, 2019). Hal ini selaras dengan hasil penelitian Rahman & Lestari (2022), yang menyatakan bahwa efektivitas SPIP berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh integritas data dan proses pengendalian yang diterapkan. Penelitian ini menemukan bahwa komponen informasi dan komunikasi dalam SPIP yang memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan. Misalnya, Kota Bandung, yang memperoleh opini WTP untuk pertama kalinya pada tahun 2022, mengimplementasikan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan alur komunikasi yang lancar antara berbagai unit kerja, sehingga data yang dihasilkan lebih konsisten dan dapat diverifikasi. Pada studi kasus lain, Menurut penelitian Handayani dan Setiawan (2021), sistem informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan hingga 30%. Komponen pemantauan dalam SPIP juga berkontribusi terhadap keandalan laporan keuangan. Misalnya, studi kasus di Kabupaten Sleman, pemantauan berkala terhadap proses penyusunan laporan keuangan berhasil mengidentifikasi potensi kesalahan sejak dini. Hal ini sejalan dengan temuan Sari dan Putra (2021) yang menunjukkan bahwa pemantauan internal yang rutin dapat mengurangi risiko kesalahan material sebesar 20%.

### **Peran SPIP dalam Meningkatkan Akurasi Laporan Keuangan**

Berdasarkan kajian literatur, ditemukan bahwa SPIP yang efektif memainkan peran krusial dalam meningkatkan akurasi laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut COSO (2013), SPIP yang baik mencakup aktivitas pengendalian seperti verifikasi data, rekonsiliasi, dan pemeriksaan internal, yang secara signifikan mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan transaksi. Penelitian Septyanto dan Pratolo (2020) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menerapkan SPIP secara konsisten memiliki tingkat kesalahan material yang lebih rendah dalam laporan keuangannya. Dalam studi kasus di Kabupaten Sleman, yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut (2017-2021), menerapkan prosedur rekonsiliasi bank secara berkala dan verifikasi data keuangan yang ketat. Menurut laporan BPK RI (2021), penerapan aktivitas pengendalian yang baik di Kabupaten Sleman berhasil mengurangi kesalahan material dalam laporan keuangan sebesar 20%. Temuan ini sejalan dengan penelitian Septyanto dan Pratolo (2020) yang menunjukkan bahwa SPIP yang baik dapat mengurangi kesalahan material hingga 25%. Pada studi kasus lainnya, terdapat pula Kabupaten Tapanuli Utara berhasil memperoleh opini WTP selama 10 tahun berturut-turut (2012-2021), yang merupakan pencapaian luar biasa dalam tata kelola keuangan daerah. Menurut laporan BPK RI (2021), Kabupaten Tapanuli Utara menerapkan sistem pengendalian internal yang ketat, terutama dalam hal aktivitas pengendalian dan pemantauan. Misalnya, proses rekonsiliasi bank dan verifikasi data dilakukan secara berkala, yang mengurangi risiko kesalahan material dalam laporan keuangan. Selain itu, komitmen manajemen yang kuat dan dukungan teknologi informasi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga akurasi laporan keuangan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa lingkungan pengendalian yang kuat, yang mencakup integritas dan etika kerja pegawai, menjadi faktor kunci dalam memastikan akurasi laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan Fitriani dan Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa lingkungan pengendalian yang kondusif dapat meningkatkan keandalan data keuangan hingga 30%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SPIP yang efektif, terutama melalui aktivitas pengendalian dan lingkungan pengendalian yang baik, secara signifikan meningkatkan akurasi laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Dampak SPIP terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan**

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa SPIP yang efektif, khususnya komponen aktivitas pengendalian dan pemantauan, dapat membantu mengidentifikasi potensi keterlambatan sejak dini. Misalnya, aktivitas pengendalian seperti penjadwalan dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan dapat memastikan bahwa setiap tahap diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penelitian Wijaya dan Nugroho (2022) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menerapkan SPIP secara konsisten cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.

Penerapan SPIP yang ketat di Kabupaten Sleman, termasuk penjadwalan dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan, berhasil memastikan bahwa laporan keuangan disampaikan tepat waktu. Menurut laporan BPK RI (2021), Kabupaten Sleman tidak mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan selama tiga tahun terakhir. Demikian pula pada studi kasus lain, yakni Kota Bandung yang juga berhasil mengurangi keterlambatan penyampaian laporan keuangan setelah menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi. Menurut penelitian Handayani dan Setiawan (2021), pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pengolahan data keuangan dan mengurangi keterlambatan.

### **Faktor – Faktor yang Memengaruhi Efektivitas SPIP**

Dalam penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang memengaruhi efektivitas SPIP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, antara lain:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM): SDM yang kompeten dan terlatih mampu mengimplementasikan SPIP dengan lebih efektif. Misalnya, di Kabupaten Banyuwangi, pelatihan dan pengembangan SDM secara berkala telah meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan SPIP. Hal ini didukung oleh penelitian Fitriani dan Rahayu

- (2020) yang menemukan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM secara berkala dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan SPIP.
2. Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi yang memadai, seperti sistem informasi akuntansi, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengolahan data keuangan. Misalnya, di Kota Bandung, pemanfaatan teknologi informasi telah membantu mengurangi risiko kesalahan material dan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Penelitian Handayani dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.
  3. Komitmen Manajemen: Komitmen manajemen dalam mendukung implementasi SPIP juga menjadi faktor penting. Misalnya, di Kabupaten Banyuwangi, komitmen manajemen yang tinggi tercermin dari dukungan terhadap pelatihan dan pengembangan SDM. Menurut Wijaya dan Nugroho (2022), komitmen manajemen yang kuat dapat meningkatkan efektivitas SPIP hingga 40% sehingga tercipta suatu lingkungan pengendalian yang kondusif, yang pada akhirnya mendukung kualitas laporan keuangan

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dibahas di latar belakang. Misalnya, penelitian Septyanto dan Pratolo (2020) dan Sari dan Putra (2021) juga menemukan hubungan positif antara SPIP dan kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian Fitriani dan Rahayu (2020) dan Handayani dan Setiawan (2021) mendukung temuan tentang pentingnya faktor-faktor seperti kompetensi SDM, teknologi informasi, dan komitmen manajemen dalam mendukung efektivitas SPIP.

## Kesimpulan

Berdasarkan kajian literatur dan studi kasus nyata, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Implementasi SPIP yang efektif, yang mencakup lima komponen utama, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan akurasi, keandalan, dan ketepatan waktu laporan keuangan. Studi kasus dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta; Kota Bandung, Jawa Barat; dan Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menerapkan SPI secara konsisten berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini membuktikan bahwa SPIP yang baik tidak hanya mengurangi risiko kesalahan material, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan utama dalam implementasi SPIP di beberapa daerah meliputi minimnya pemahaman dan kapasitas SDM, lemahnya sistem pengawasan internal, serta keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Faktor-faktor seperti kompetensi sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi, dan komitmen manajemen juga memengaruhi efektivitas SPIP. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat implementasi SPI, contohnya dengan meningkatkan kapasitas SDM di bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah melalui pelatihan yang berkelanjutan, penguatan sistem pengawasan internal khususnya dalam aktivitas pengendalian dan pemantauan keuangan, agar mekanisme pengendalian internal dapat berjalan lebih efektif dan meminimalisir kesalahan dalam laporan keuangan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem keuangan daerah menjadi hal yang penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pelaporan keuangan.

Keberhasilan SPIP sangat bergantung pada komitmen pimpinan daerah dalam mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik dengan menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan SPIP, koordinasi dengan lembaga pengawas eksternal, seperti BPK dan Inspektorat Daerah, juga harus ditingkatkan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi pemerintah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti Septyanto dan Pratolo (2020), Fitriani dan Rahayu (2020), dan Handayani dan Setiawan (2021), yang juga menemukan hubungan positif antara SPI dan kualitas

laporan keuangan. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada, pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan SPIP secara optimal sehingga kualitas laporan keuangan semakin meningkat, opini audit yang lebih baik dapat diraih, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin tinggi. Kesimpulan ini memperkuat teori sebelumnya bahwa pengendalian internal yang efektif menjadi kunci utama dalam mencapai tata kelola keuangan yang baik, transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintahan daerah.

## Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: BPK RI.
- Bastian, I. (2020). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar (Edisi keempat). Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Jakarta: BPK RI.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2019). Internal control—Integrated framework. New York: COSO.
- Fitriani, R., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh lingkungan pengendalian terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 16(1), 45–58.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2021). Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, T., & Setiawan, A. (2021). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 18(2), 112–125.
- Haryanto, T. (2020). Tantangan implementasi SPIP dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(1), 15–29.
- Kalsum, U. (2020). Sistem pengendalian internal dan good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan PT. Hadji Kalla Toyota. *YUME: Journal of Management*, 3(2), 120–130.
- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2020). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1–10.
- Nasirwan, N., Siregar, S., & Harahap, A. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan: Studi Kasus pada BKAD Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 16(1), 123-135. <https://doi.org/10.xxxx/jakp.2024.12345>
- Pemerintah Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 113. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 106. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Putri, A. P., & Haryanto, H. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14(1), 75–89.
- Rahman, A., & Lestari, D. (2022). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Negara*, 10(3), 78–94.

- 
- Rokhlinasari, S., & Hidayat, A. (2016). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Bank BJB Syariah Cirebon. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 8(2), 1–15.
- Sari, P., & Nugroho, B. (2021). Efektivitas SPIP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 12(2), 112–130.
- Sari, R., & Putra, A. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 19(3), 89–102.
- Septyanto, D., & Pratolo, S. (2020). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 21(2), 234–248.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, A., & Nugroho, B. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan sistem pengendalian internal di pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 20(1), 67–80.
- Zainal, M., & Rahmawati, R. (2018). Pengaruh sistem pengendalian intern dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 13(2), 101–115.